



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 242-1 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK 2018-2038
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, perlu dibuat rencana pengembangan induk IAIN Pontianak;

b. bahwa rencana strategis IAIN Pontianak telah disusun, perlu ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang rencana pengembangan induk (RIP) Institut Agama Islam Negeri Pontianak 2018-2038;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2017;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

11. Peraturan Menteri Agama, Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Kerja sama pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Pengkalan data Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama IAIN Pontianak.
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG RENCANA INDUK (RIP) PENGEMBANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK 2018-2038;

KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Pontianak 2018-2038 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketetapan Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak 2018-2038 ini menjadi salah satu acuan dalam perencanaan induk pengembangan Kampus IAIN Pontianak;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 03 September 2018

REKTOR,


Dr. SYARIF, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001

Tembusan:

1. Kepala Biro AUAK;
2. Wakil Rektor III IAIN Pontianak;
3. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Biro AUAK IAIN Pontianak.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 242.1 Tahun 2018

Tanggal : 03 September 2018

Tentang : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK 2018-2038

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK 2018-2038

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa. Melalui pendidikanlah bangsa akan tegak mampu menjaga martabat.

Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Dalam Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berlangsung sejak 1994 sampai dengan 2019 bahwa bahwa pendidikan nasional mewujudkan rasa cinta tanah air yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian, dan tekad untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik harus terus dibangkitkan dan dipelihara sehingga berkembang menjadi sikap mental dan sikap hidup masyarakat yang mampu mendorong proses akselerasi pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia

yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasman dan rohani serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ada masa depan.

2. Tujuan Pendidikan Tinggi

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi yang penyelenggaraannya pada perguruan tinggi seperti universitas dan institut, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dapat:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta pengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Tujuan Perguruan Tinggi Agama Islam adalah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang menjadi pusat pengembangan dan pendalaman pengetahuan agama Islam. Dengan kata lain, bahwa pendirian PTAIN dimaksudkan untuk menghasilkan ahli-ahli agama Islam untuk mengisi kebutuhan masyarakat dan negara. Hal ini berdasarkan bahwa Islam adalah kelompok masyarakat terbesar, dan karenanya masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Agama Islam masyarakat Indonesia secara mendalam masuk ke dalam semua aspek kehidupan. Tidak adanya lembaga pendidikan tinggi bidang agama di Indonesia mengakibatkan para lulusan madrasah dan pesantren selama kurun waktu yang lama melanjutkan studinya ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama di Timur Tengah, Makkah maupun Kairo. PTAI dalam sudut pandang ini, diharapkan menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu tersebut. Selain itu, pendidikan taraf universitas agama dan ilmu pengetahuan Islam sangat urgen sekali karena sebagian besar bangsa Indonesia memeluk agama Islam.

Mempertinggi taraf pendidikan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan berarti mempertinggi taraf kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian (spiritualitas) maupun intelektualitas.

Dari tujuan PTAI tersebut, memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam diletakkan azas untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasman dan rohani serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

B. Dasar Hukum

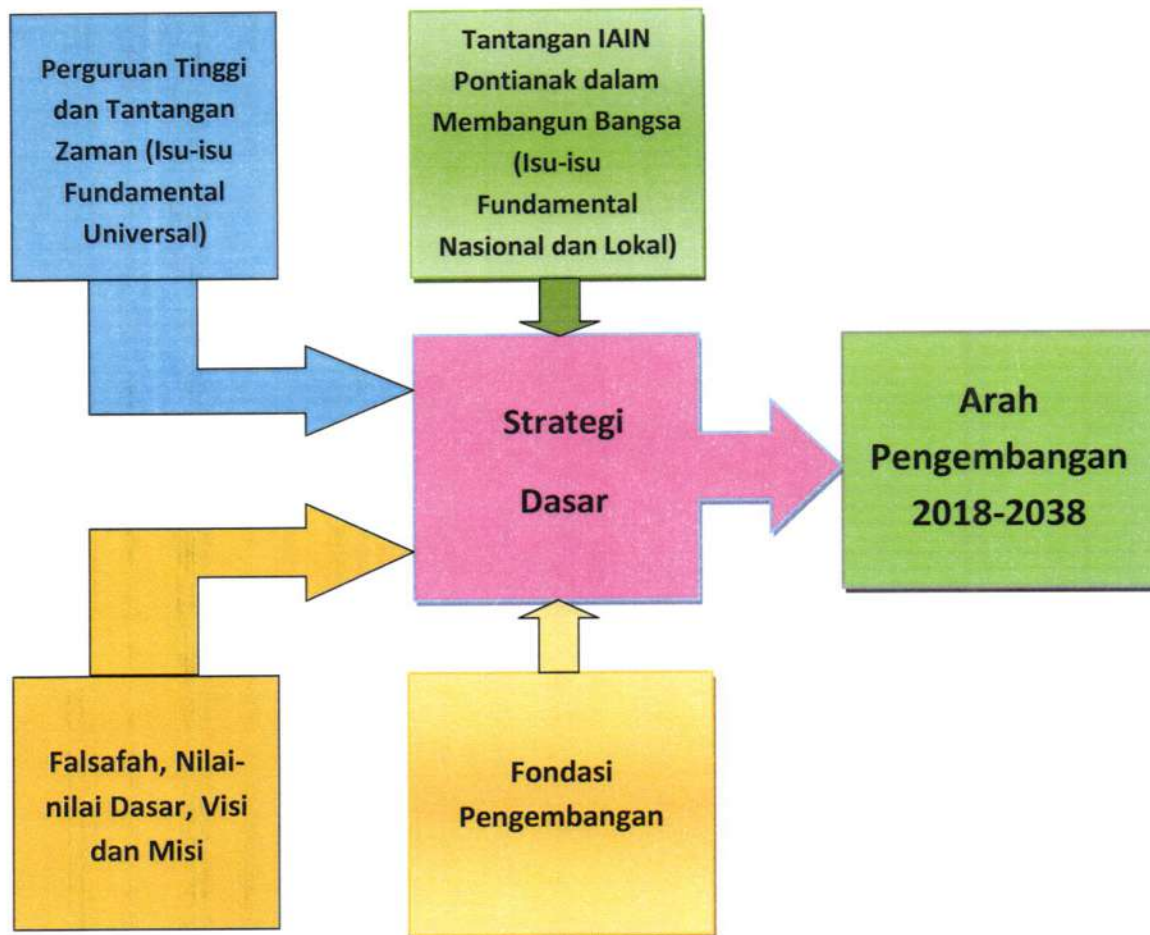
1. UUD 1945, hasil amandemen ke-4, pasal 31 tentang "Sistem Pendidikan Nasional".
2. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang "Visi Indonesia Masa Depan".
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional".
4. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional".
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang "Pendidikan Tinggi".
6. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang "Standard Nasional Pendidikan".
7. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang "Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan".
8. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".
9. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi"
10. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang 'Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum'".
11. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang "Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".
12. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi".
13. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia".

14. Perpres Nomor 53 Tahun 2013 tentang “Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak”.
15. Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang “Organisasi Kementerian Negara”.
16. Perpres Nomor 83 Tahun 2015 tentang “Kementerian Agama”.
17. Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005 tentang “Rencana Strategis Depdiknas”.
18. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang “Standard Nasional Pendidikan Tinggi”.
19. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 tentang “Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi”.
20. PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang “Organisasi dan Tatakerja Kementerian Agama”.
21. PMA Nomor 65 Tahun 2013 tentang “Pelayanan Publik di Kementerian Agama”.
22. PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang “Organisasi dan Tatakerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak”.
23. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang “Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat”.
24. PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang “Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak”.
25. KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak”.
26. KMA Nomor B.II/3/18302 tanggal 5 Juni 2018 tentang “Penunjukan Rektor IAIN Pontianak”.

C. Kerangka Pemikiran Penyusunan RIP IAIN Pontianak

Dalam rangka ikut serta mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka IAIN Pontianak sebagai suatu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) perlu melakukan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Pontianak 2018-2038 dengan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pikir Penyusunan RIP



D. Isi/Ruang Lingkup

Pada dasarnya isi/ruang lingkup Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak 2018-2038 dapat dilihat pada Gambar 1 mengenai kerangka pikir penyusunannya. Secara lebih rinci isi/ruang lingkup Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak 2018-2038 ini dapat dilihat pada Daftar Isi yang mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Kerangka Pikir Penyusunan
- D. Isi/Ruang Lingkup
- E. Proses Penyusunan

BAB II PERGURUAN TINGGI DAN TANTANGAN ZAMAN

- A. Perguruan Tinggi, Riset dan Inovasi.
- B. IPTEK: Krisis dan Tantangan.
- C. Persaingan Global.
- D. Umat yang Unggul dan Moderat.
- E. Respons Pendidikan Tinggi.

BAB III TANTANGAN IAIN PONTIANAK DALAM MEMBANGUN BANGSA

- A. Peningkatan IPM.
- B. Penurunan Angka Kemiskinan.
- C. Perluasan Akses Pendidikan Tinggi.
- D. Pelestarian Lingkungan.
- F. Minimalisasi Radikalisme dan Terorisme.
- G. Keadilan dan Kesetaraan gender.
- H. Pemberdayaan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.
- I. Pelestarian Kearifan Lokal.
- J. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerjasama.

BAB IV FALSAFAH, NILAI DASAR, VISI DAN MISI

- A. Falsafah
- B. Nilai Dasar
- C. Visi dan Misi Indonesia Masa Depan.
- D. Visi dan Misi Pendidikan Nasional.
- E. Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia.
- F. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- G. Visi dan Misi IAIN Pontiana 2038.

BAB V FONDASI PENGEMBANGAN

- A. Kebijakan Dasar IAIN Pontianak
- B. Tanggung jawab IAIN Pontianak Menjalankan Misi Mewujudkan Visi
- C. Harapan dan Sifat-sifat Dasar
- D. Infrastruktur IAIN Pontianak
- E. Pengembangan IAIN Pontianak
- F. *Baseline* Menuju Visi IAIN Pontianak Menuju 2038.

BAB VI STRATEGI DASAR

BAB VII ARAH PENGEMBANGAN

- A. Matriks Skenario
- B. Tahapan, Arah, Target Utama, dan Indikator Umum
- C. Pengendalian dan Penjaminan Mutu.

E. Proses Penyusunan

Penyusunan RIP IAIN Pontianak dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Pimpinan IAIN Pontianak untuk tanggap darurat penyusunan RIP IAIN Pontianak 2018-2022.
2. Penerbitan Surat Keputusan Rektor mengenai Tim Penyusun Rencana

Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional IAIN Pontianak 2018-2022.

3. Rapat Tim untuk pembagian tugas dan penentuan jadual kerja.
4. Persiapan yang berupa pengkajian referensi dan pengumpulan data.
5. Penyusunan RIP IAIN Pontianak 2018-2038 masing-masing bab.
6. Sinkronisasi antar bab (Versi 1).
7. Presentasi dan pembahasan yang melibatkan LPM IAIN Pontianak.
8. Revisi pertama (Versi 2) dan pembuatan *booklet*.
9. Presentasi dan pembahasan yang melibatkan Pimpinan IAIN Pontianak.
10. Revisi kedua (Versi 3).
11. Pemeriksaan plagiarism.
12. Revisi ketiga (Versi 4).
13. Penerbitan Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak tentang "Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak 2018-2038".

II. PERGURUAN TINGGI DAN TANTANGAN ZAMAN

A. Perguruan Tinggi, Riset dan Inovasi

"Panta rei kai uden menei, hidup itu mengalir sebagaimana air, tidak ada yang tinggal menetap", demikian Heraklitos, seorang filsuf sejarah zaman Yunani kuno ingin menjelaskan tentang kehidupan manusia yang dinamis. Asumsi filosofis dari Heraklitos ini bisa dimafhumi, terutama jika kita menelusuri pola perkembangan manusia di sepanjang sejarahnya. Salah satunya, adalah perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi memberikan dampak pada pergeseran paradigma manusia dalam kehidupannya. Inovasi mengantar umat manusia merambah kehidupan baru yang belum pernah dibayangkannya. Fakta demikian membuat inovasi tak bisa diabaikan jika sebuah komunitas bangsa ingin bangkit meraih kemajuan dalam hal teknologi dan peradaban.

Tak ada yang membantah, bahwa teknologi telah menjadi hulu perubahan peradaban. Potret historispun menunjukkan fakta demikian. Abad informasi dimulai dengan penemuan mesin cetak oleh Guttenberg. Abad industri dimulai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Internet dan kemudian media sosial hadir kemudian dan mengubah cara manusia terhubung satu sama lain ke tahap yang benar-benar baru. Bahkan kemajuan teknologi dan system informasi buah dari inovasi

manusia, membuat dunia yang berjauhan saling terhubung dan berinteraksi. Seperti “kertas yang dilipat” dalam asumsi Yasraf Amir Pilliang (2006).

Ekonom Klaus Schwab (2016) menyebut masyarakat dunia sedang berada di ambang revolusi industri keempat. Era ini ditandai dengan berkembangnya teknologi nano dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Bahkan lebih jauh lagi, umat manusia sedang bersiap memasuki era i. Ketiga hal itu akan membuat kehidupan manusia benar-benar memasuki fase baru yang penuh kejutan. Fenomena perubahan ini tidak bisa dielakkan akan dialami oleh semua komunitas manusia dalam berbagai tingkat peradaban, tanpa terkecuali, termasuk Indonesia.

Pada aras ini, sebagai anggota komunitas dunia, bangsa Indonesia perlu menyiapkan diri menjadi agen aktif yang turut menentukan arah perkembangan teknologi. Salah satunya, dengan memperkuat riset di berbagai bidang kehidupan agar melahirkan aneka inovasi. *Roadmap* riset hakikatnya telah dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan diterbitkannya Rencana Induk Riset Nasional 2015-2045. Rencana jangka panjang itu digunakan agar riset berkembang terarah untuk memperkuat pembangunan nasional yang bermuara terhadap kesejahteraan rakyat dan menguatnya posisi Indonesia dalam masyarakat dunia. Riset didudukkan sebagai sarana meningkatkan daya saing bangsa.

“Daya saing” menjadi topik yang menarik karena dunia berkembang menuju arah yang lebih koempetitif. Di satu sisi, integrasi dan kerja sama kawasan membuat hubungan antarbangsa menjadi relatif mudah. Tetapi di sisi lain, bangsa satu dengan bangsa lain harus siap berkompetisi secara *head to head*. Karena itulah, pengelolaan riset dalam kerangka penguatan daya saing nasional menjadi sangat relevan.

Secara umum, Indonesia memiliki keuntungan alamiah yang membuatnya berpeluang menjadi bangsa dengan daya saing kuat. Selain bonus demografi, ekonomi Indonesia menguat menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia. Namun kedua keuntungan itu akan kurang bermakna jika tidak diiringi dengan tradisi inovasi yang baik. Alih-alih menjadi kekuatan kompetitif, bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi justru bisa membuat Indonesia hanya menjadi pasar produk dunia.

Mengingat pentingnya penelitian dan inovasi, agaknya negara kita perlu belajar dari negara maju. Belajar dari beberapa negara maju, Indonesia perlu mengoptimalkan tiga modal besar yang dimiliki, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan iklim. Di Jepang dan Korea Selatan misalnya, sumber daya manusia menjadi modal yang sangat berpengaruh. Kedua negara ini berinvestasi secara besar-besaran agar dapat memiliki ahli iptek dalam jumlah besar dan dengan kemampuan mumpuni. Diperkirakan, total tenaga peneliti yang dimiliki Korea Selatan mencapai angka 400 ribu pada tahun 2016. Angka ini setara dengan 8 ribu peneliti per sejuta penduduk. Adapun di Indonesia baru memiliki 1.071 peneliti per sejuta penduduk. Itupun jika seluruh dosen diasumsikan sebagai peneliti aktif.

Namun demikian Indonesia tak semestinya inferior. Sebab, investasi Indonesia melalui dana pendidikan LPDP akan segera melahirkan generasi intelektual baru yang sebagian akan berkiprah sebagai ilmuwan. Pada saat yang sama, skema beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) juga akan melahirkan generasi pemikir baru. Modal ini perlu dipelihara agar dapat menopang ketercapaian rencana induk riset nasional. Modal lainnya adalah anggaran. Di era ekonomi berbasis pengetahuan, anggaran yang dimiliki negara perlu dialokasikan dalam investasi penelitian. Langkah ini perlu dilakukan karena telah terbukti adanya relevansi antara kemajuan ekonomi dengan investasi dalam bidang penelitian.

Kebangkitan nasional yang berbasis inovasi hanya mungkin terjadi jika perguruan tinggi memberi kontribusi. Sebab, tenaga peneliti produktif Indonesia memang lebih banyak yang berbasis di perguruan tinggi. Para dosen adalah peneliti produktif di berbagai bidang ilmu. Agar tradisi riset terus berkembang, peran perguruan tinggi tidak boleh diabaikan. Bahkan tren menunjukkan, perguruan tinggi menjadi pemain terdepan. Bagi perguruan tinggi riset adalah bagian integral dari kewajiban sosial yang terhimpun dalam tri dharma perguruan tinggi. Artinya, riset dan inovasi memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Kementerian Agama RI saat ini bertekad dan terus berikhtiar untuk menjadikan pendidikan Islam Indonesia, termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKI), sebagai destinasi pendidikan Islam dunia. Pada maksud tersebut, Indonesia mengambil momentum mengisi "ruang kosong" yang menjadi kegelisahan dunia Islam internasional dalam

menentukan referensi pendidikan Islam yang saat ini tengah dibutuhkan. Terobosan untuk mencapai cita-cita tersebut, di antaranya dengan carapeningkatan kualitas penelitian dan inovasi sehingga benar-benar tepat sasaran dan kontributif baik bagi dunia akademik maupun masyarakat.

B. IPTEK: Krisis dan Tantangan

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seperti dua sisi pada satu koin mata uang. Perkembangan pesat ilmu dan teknologi (IPTEK) yang semula bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi manusia. Ibarat cerita Raja Midas yang menginginkan setiap yang disentuhnya menjadi emas, ternyata ketika keinginannya dikabulkan dia tidak semakin senang, tetapi semakin resah bahkan gila. Sebab, tidak saja rumah dan seisi rumah yang menjadi emas, tetapi istri dan anak yang disentuh pun menjadi emas sehingga sang raja pun akhirnya meratapi nasib yang kesepian tanpa ada makhluk hidup yang mendampinginya. Begitu juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan tersebut semakin mudah maka muncul krisis berupa "kesepian" dan "keterasingan" baru yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan dan silaturahmi.

Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini senyatanya telah membius manusia untuk tunduk pada sebuah benda atau piranti buatan manusia. Jika manusia tidak segera menyadarinya, maka seperti tragedy Midas, ia akan hilang akan sesuatu yang amat penting dari kehidupannya, yaitu solidaritas, kebersamaan, kehangatan silaturahmi, dan semacamnya. Jika kita tidak ingin kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari penyakit bawaan berupa dehumanisasi, maka kita mesti berjuang untuk mengeluarkan diri dari penjara teknologi, dan kembali ada eksistensi awal manusia yang kreatif, inovatif dan dinamis. Penyadaran akan krisis dehumanisasi ini perlu terus digaungkan, terus-menerus dalam berbagai level kebijakan dan proses pendidikan.

Orientasi pendidikan tinggi sudah sewajarnya menjawab persoalan ini, dan membantu untuk keluar dari krisis sebagaimana di atas. Pendidikan tinggi perlu beradaptasi dengan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jangan sampai ikut terpenjara dengan kemajuan tersebut sehingga kehilangan sisi-sisi humanisasinya.

Dalam perkembangan semakin mutakhir, pendidikan tinggi memang perlu bergerak dengan lebih cepat, murah dan cepat, seperti sebuah slogan "*easier, cheaper, faster.*" Di sadari perkembangan pesat ilmu pengetahuan teknologi dibuat untuk memberikan kemudahan dalam segala hal, salah satunya berbuah globalisasi. Adalah fakta yang tak terbantahkan, globalisasi telah mengepakkan sayap, menancapkan kuku-kuku dan menghujamkan utopia masa depan yang semakin tanpa batas. Namun di sinilah letak pentingnya, atas nama kemanusiaan global, kita perlu menempatkan globalisasi dalam kerangka humanisasi. Sehingga globalisasi yang tak bisa ditolak dan menjadi fakta pada hari ini dapat menumbuhkan aspek-aspek human dignity dan human compassion. Bukan sebaliknya menjadi ancaman dan picu krisis dehumanisasi.

C. Persaingan Global

Perguruan tinggi sudah sepatutnya tidak diposisikan sebagai *centre of excellence* tetapi juga *centre of change*. Maksudnya, perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi agama Islam, tidak hanya sebagai pusat pemikiran dan ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai pusat perubahan. Dengan demikian, tanggung jawab civitas akademika bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi juga menerapkannya demi kebaikan masyarakat dan kesejahteraan seluruh bangsa. Sebab itu, tugas perguruan tinggi adalah menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengatasi tantangan bangsa ke depan. Implikasinya, perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan daya saing bangsa.

Pada era globalisasi ini, perguruan tinggi perlu berkontribusi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi serta berwawasan global. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan sumber daya yang mampu bersaing secara global. Jangan sampai ada sarjana yang menganggur paska lulus. Apalagi berdasarkan informasi Ristekdikti, diperkirakan sekitar 8,8% dari total 7 juta pengangguran di Indonesia merupakan sarjana yang menganggur pasca lulus.

Kita harus mafhum, bahwa era globalisasi sebagaimana saat ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat antarnegara atau biasa disebut dengan persaingan global. Persaingan global sendiri merupakan suatu bentuk kompetisi tingkat dunia dimana setiap negara berhak untuk ikut bersaing tanpa dibatasi oleh wilayah. Hal ini makin menguat saat ada kesepakatan

negara-negara anggota ASEAN yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan adanya MEA ini memungkinkan negara-negara anggota ASEAN akan dapat dengan mudah menjual barang dan jasa di wilayah Asia Tenggara, sehingga persaingan tentunya akan lebih ketat. Tidak hanya membuka arus barang atau jasa, tetapi MEA juga membuka pasar tenaga profesional.

Untuk itulah, perlu peranan perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam dalam menciptakan sumber daya-sumber daya alumni yang mampu dan berdaya saing, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Perguruan tinggi perlu mempersiapkan untuk menghadapi situasi dan kondisi ini dengan mempertahankan mutu dan kualitasnya sehingga akan lebih siap, dan pada gilirannya menghasilkan lulusan yang dibutuhkan dengan kebutuhan abad ini. Hal ini mutlak dilakukan, apalagi saat ini, di era globalisasi, masyarakatlah yang akan memutuskan dalam memilih perguruan tinggi yang mampu menjamin kompetensi lulusannya. Oleh karena itu pelaksanaan budaya mutu di perguruan tinggi sangat dibutuhkan dan tidak dapat ditawar lagi demi peningkatan daya saing alumni-alumninya.

D. Umat Unggul yang Moderat

IAIN Pontianak sebagai salah satu dari perguruan tinggi Islam yang merespon secara serius mengenai isu-isu keislaman pada akhir-akhir ini, salah satunya adalah umat terbaik. Kajian-kajian atau riset-riset yang dikembangkan oleh perguruan tinggi Islam seharusnya berkonsentrasi kepada keilmuan keislaman yang diintegrasikan dengan keilmuan umum. Begitu juga dengan tugas perguruan tinggi keagamaan Islam yang mencetak generasi Islam yang ulung sehingga menjadi generasi umat terbaik dalam konsep agama Islam.

Hal ini sejalan dengan prinsip keumatan dalam ajaran Islam, yang mengarah pada progresifitas atau kemajuan. Atau dalam Bahasa agama, “umat yang terbaik”, sebagaimana QS Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ
 آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagimu mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Ayat ini telah memberikan beberapa kualifikasi untuk menjadi umat yang terbaik atau unggul, yaitu: pertama, menyuruh kepada kebaikan; kedua, mencegah kepada yang mungkar; dan ketiga, beriman kepada Allah. Menjadi umat terbaik berarti memperoleh kemuliaan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

Untuk menjadi umat terbaik, para ulama telah bersepakat bahwa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dihukumi *fardhu kifayah*. Artinya kedua tugas ini wajib pada setiap manusia muslim, namun akan gugur kewajibannya jika sebagian yang lain telah menunaikannya. Kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini mencakup kepada segala hal yang dicintai Allah, sedangkan kemungkaran yang dimaksud adalah segala hal yang dibenci oleh Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa untuk menjadi umat yang terbaik tidak hanya kemampuan kepada *amar maruf nahy munkar*, akan tetapi juga harus seorang yang beriman artinya seseorang yang memeluk agama Islam atau muslim.

Tentusaja, menjadi “unggul” sebagaimana visi IAIN Pontianak bersinergi dengan maksud menjadi “umat terbaik” dalam ajaran Islam. Harapannya, tidak saja para mahasiswa dan alumni menjadi terdepan dalam pasar kerja (baca: mampu bersaing), tetapi juga mampu secara positif ikut serta dalam mengampanyekan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mampu ikut serta dalam meminimalisasi berbagai bentuk kejahatan (*nahy munkar*).

Menjadi unggul dalam makna ini, juga berarti menjadi “*ummatan wasatan*”. “*Ummat wasatan*” yang diantaranya termaktub dalam al-Baqarah ayat 143 tersebut, bermakna “adil dan seimbang”. Artinya, IAIN Pontianak sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam hendaknya mampu mencetak pribadi-pribadi umat Islam yang berbuat adil, melakukan sesuatu itu dengan seimbang antara ilmu dan amal, antara teori dan praktek, mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntutan Alquran dan Ilmu pengetahuan. *Ummatan wasatan* adalah umat Islam yang moderat, yaitu umat yang tidak ekstrem kanan (*salafi-wahabi, jihadi*, integris,

fundamentalis, dan radikal) dan tidak ekstrem kiri (liberal, ultra-liberal). Umat Islam itu harus berada di tengah-tengah: moderat. Inilah yang menjadi tantangan IAIN Pontianak. Bahkan dalam konteks ini, mahasiswa dan atau alumni IAIN Pontianak, adalah mereka yang dapat menerima perbedaan pendapat, karena perbedaan adalah hal yang alamiah, walaupun dalam satu agama (QS. 10:19).

E. Respons Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi sebagai pengawal utama perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia telah merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam berbagai sisi. Perkembangan iptek pada era industri 4.0 telah memaksa Perguruan Tinggi untuk menyiapkan daya saing yang baik sehingga mereformasi dirinya dalam berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud ialah kelembagaan, sumber daya, kurikulum, bidang studi, inovasi, serta pengembangan perguruan tinggi ke arah *cyber/digital university*.

Perubahan zaman nirbatas ini, menjadikan Perguruan Tinggi mau tidak mau berinovasi dengan banyak mengandal teknologi sebagai salah satu indikator perguruan tinggi yang berdaya saing di era ini. Inovasi tersebut yang menjadi respon perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi yang berbasis agama seperti IAIN Pontianak.

Perubahan era ini, tentu saja menghadirkan beberapa fakta yang tidak terelakkan terutama bagi perguruan tinggi, di antaranya adalah, *pertama* Industri telah menawarkan dunia tanpa sekat sehingga pasar yang ditawarkan lebih luas. *Kedua*, industri 4.0 menawarkan peluang pasar-pasar baru yang terutama mengarah pada produsen teknologi, seperti sensor, 3D printing, kecerdasan buatan, teknologi informasi, *market online* dan lain-lain. *Ketiga*, selain menutup lapangan kerja konvensional, industri 4.0 juga membuka lapangan kerja baru yang berbasis kepada penggunaan teknologi.

Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hadir menjawab tantang tersebut telah merumuskan beberapa strategi dasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Adapun strategi dasar yang dimaksud adalah, *pertama* berinovasi dalam pembelajaran dengan menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan era saat ini serta menyiapkan mahasiswa yang terampil dalam hal teknologi informasi terutama pada aspek literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanis.

Kedua, kebijakan kelembagaan Perguruan Tinggi diupayakan lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman terutama dalam pengembangan ilmu dan program studi. *Ketiga*, mempersiapkan inovasi model perguruan tinggi siber/digital dengan merekonstruksi sistem perkuliahan nirbatas sehingga perkuliahan bisa dilakukan jarak jauh tanpa mengurangi substansi keilmuannya. *Keempat*, mempersiapkan sumber daya manusia, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan untuk mempersiapkan layanan sesuai dengan era revolusi industri 4.0. *kelima*, meremajakan sarana dan prasarana yang menopang pelayanan ke arah era revolusi industri 4.0. *Keenam*, meningkatkan kualitas dan kuantitas riset sebagai respon perguruan tinggi dalam menghadapi era baru ini. *Ketujuh*, menggandeng masyarakat dan bekerja sama dengan lembaga mitra dalam pemecahan solusi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.

III. TANTANGAN IAIN PONTIANAK DALAM MEMBANGUN BANGSA

A. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat menempati ranking 29 dari 34 Provinsi yang ada. Hal ini menunjukkan IPM Kalimantan Barat belum begitu menggembirakan. Sementara Indonesia sendiri, berdasarkan UNDP, Indonesia menempati urutan ke-113 dari 188 negara pada tahun 2015 dengan IPM sebesar 68,9 (sebesar 69,55 berdasarkan data BPS).

Pada dasarnya, IPM merupakan cerminan dari kualitas kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), pendidikan (lama bersekolah) dan perekonomian (pendapatan per kapita) suatu negara maupun wilayah. Meskipun begitu, IPM dapat berfungsi sebagai indikator kesenjangan apabila dipecah berdasarkan wilayah maupun komponen yang lebih kecil lagi. Untuk melihat hal tersebut, tabel berikut ini adalah statistik deskriptif mengenai IPM Indonesia per provinsi dari tahun 2010 s.d. 2016.

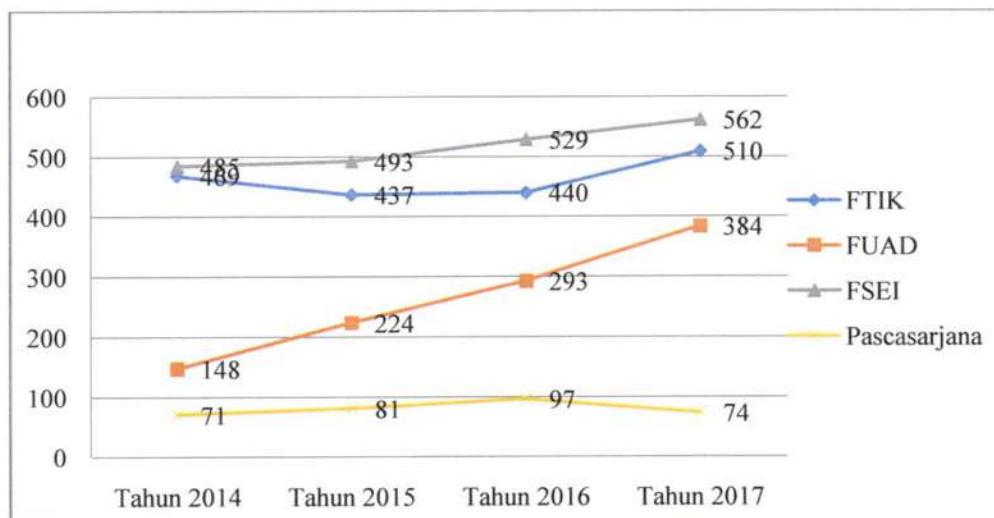
Tabel 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia

Tahun	Banyak Provinsi	Nasional	Rata-rata	Median	Standar Deviasi	Min	Maks	Rentang	IQR
2010	33	66.53	65.59	65.96	4.39	54.45	76.31	21.86	3.96
2011	33	67.09	66.19	66.38	4.36	55.01	76.98	21.97	3.61
2012	33	67.7	66.8	66.94	4.33	55.55	77.53	21.98	3.49
2013	34	68.31	67.47	67.66	4.2	56.25	78.08	21.83	3.03
2014	34	68.9	67.98	68.19	4.16	56.75	78.39	21.64	2.81
2015	34	69.55	68.58	68.83	4.17	57.25	78.99	21.74	3.05
2016	34	70.18	69.16	69.44	4.15	58.05	79.6	21.55	3.06

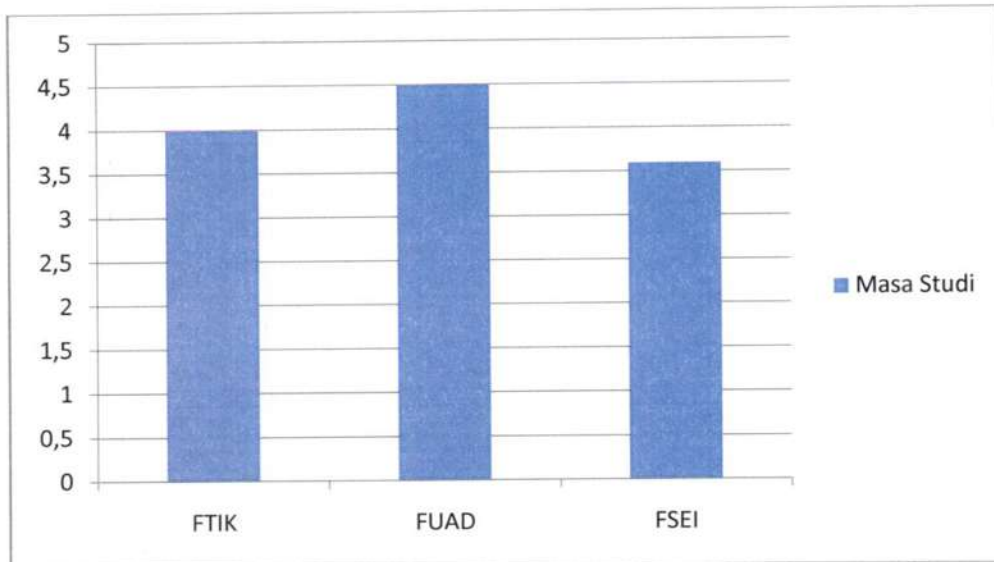
Rendahnya Indeks pembangunan Manusia (IPM) ini, sedikitnya mengisyaratkan tiga hal: fenomena sosial, fenomena teknologi, dan fenomena konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah bersama perguruan tinggi, sebagai lapisan masyarakat yang disebut Plato sebagai “manusia kepala” perlu mengambil peran untuk meningkatkan IPM ini melalui rekayasa sosial, rekaya teknologi, dan penerapan UUD 1945. IAIN Pontianak, sebagai elemen perguruan tinggi bersama perguruan tinggi lainnya di bawah Kementerian Agama dan atau perguruan tinggi umum di bawah Kemenristek Dikti hendaknya bertanggung jawab dalam hal ini. Karenanya, tantangan bagi IAIN Pontianak membuka Prodi-Prodi yang punya peluang untuk meningkatkan IPM.

Apalagi, secara kuantitas mahasiswayang terdaftar di IAIN Pontianak cukup tinggi di tiap tahunnya, yang tentu mana mahasiswa yang kelak menjadi para alumni ini akan ikut mendongkrak angka IPM.

Tabel 2
Jumlah Mahasiswa IAIN Pontianak 2014-2018



Tabel 3
Masa Studi Mahasiswa IAIN Pontianak (dalam tahun)



B. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Kalimantan Barat. Pada bulan Maret 2017, garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebesar Rp.377.219 per bulan dan diperkirakan ada 387,43 ribu jiwa atau 7,88 persen penduduk miskin. Sebagian besar keluarga miskin di Kalimantan Barat bekerja di Desa.

sementara lepas dari jeratan kemiskinan merupakan salah satu hajat hidup orang banyak. Kemiskinan pada konteks ini bias dimaksudkan sebagai sebuah keadaan tidak mampu baik dari individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat – sebagaimana yang didefinisikan oleh BPS (2017) – di mana keadaan ini bias menjadi picu terjadinya permasalahan sosial. Implikasinya, terjadi kesenjangan sosial dan pengangguran. Dengan demikian, kemiskinan tidak sekedar persoalan ekonomis, namun lebih jauh kemiskinan berhubungan dengan persoalan kemanusiaan.

Hampir semua negara mengalami persoalan kemiskinan, dan termasuk pula Indonesia. Pada masa Pemerintahan Orde Baru (antara tahun 1960-1996), tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis - baik di desa maupun di kota - karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja. Hanya saja, pada akhir tahun 1990an, terjadi krisis

finansial di Asia, yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia melejit tinggi, yaitu dari angka 11% hingga 19,9% pada akhir tahun 1998. Krisis ini yang menjadi sebab berakhirnya Orde Baru, dan bergulirlah era Reformasi.

Bagaimana dengan keadaan masyarakat Indonesia pada hari ini? Tabel berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun absolut.

Tabel 4
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0	11.1	10.9 ¹
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	37	35	33	31	30	29	29	28	29	28 ¹
Koefisien Gini/Rasio Gini	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 4 menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 354,386 (atau sekitar USD \$25) yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri.

Bandingkan dengan statistika garis kemiskinan yang dirilis Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan (dengan kata lain *miskin*). Menurut Bank Dunia, kalau kita menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$2 per hari angkanya akan meningkat lebih tajam lagi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar lagi di media di Indonesia menginformasikan bahwa sekitar

seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 65 juta jiwa) hidup hanya sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional.

Dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lambat dari sebelumnya.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri satu-satunya di Kalimantan Barat, punya andil dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal ini karena IAIN Pontianak, tidak saja mencetak akademisi yang kompeten dalam keilmuan agama Islam maupun umum, tetapi juga punya kompetensi profesional untuk bersaing di dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Hal ini sejalan dengan asumsi dalam agama Islam, yang meyakini bahwa kemiskinan bukanlah sebuah nasib yang tidak dapat dirubah, sebab Tuhan tidak menghendaki manusia hidupnya sengsara dan memiskinkan kehidupan manusia yang diciptakan-Nya sendiri. Oleh sebab itulah manusia diberi-Nya akal, daya kekuatan dan kemampuan untuk mengubah kehidupannya, serta diberi-Nya pedoman hidup agar tidak sesat di jalan, yaitu kitab suci yang di turunkan-Nya kepada manusia. Bukan itu saja, bahkan manusia di angkat-Nya pula sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi, untuk memakmurkannya dan menjadi makmur (kaya) karenanya.

C. Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Saat ini keadaan pendidikan Kalimantan Barat masih hanya sebatas penyediaan fasilitas dan akses pendidikan, dan itupun tidak merata. Mutu pendidikan juga belum begitu baik disebabkan oleh mutu guru yang kurang. Masih ada guru yang hanya mengenyam pendidikan SMP atau SMA, dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini berimbas pada rendahnya mutu pendidikan di Kalbar (Baca: *Tribun Pontianak*, 7

Juni 2017). Jumlahnyapun terbatas, sementara tenaga guru profesional, dibutuhkan setidaknya berjumlah ribuan orang. Hal ini menimbang masih banyak sekolah yang kekurangan guru, dan pada tahun 2017 diinformasikan tidak kurang dari 1000 guru yang akan pensiun.

Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan keinginan untuk pemeratakan akses pendidikan dan mencerdaskan bangsa sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar. Sebagaimana dimafhumi, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat UUD 1945. Namun, hingga usia 71 tahun kemerdekaan RI, segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. Tentu saja ini bukan persoalan milik Kalimantan Barat saja, tetapi merupakan persoalan klasik yang terus terjadi di Indonesia. Kekurangan jumlah guru dan tidak meratanya fasilitas serta akses pendidikan berdampak pada banyaknya anak-anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan secara wajar.

Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Begitupula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

IAIN Pontianak sebagai Perguruan Tinggi di bawah naungan Kementerian Agama tentu saja punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Melalui Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak, tantangan bagi IAIN Pontianak adalah menciptakan guru-guru profesional yang pada akhirnya mampu untuk menjadi guru-guru profesional, yang selanjutnya menyebar ke daerah-daerah bahkan pelosok terpencil di Kalimantan Barat. Sementara, keberadaan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah serta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, diharapkan juga mampu menciptakan tenaga-tenaga profesional yang tidak hanya dituntut bisa bersaing dalam pasar kerja tetapi juga mampu ikut serta dalam pencerdasan masyarakat. Dalam Islam sendiri, pencerdasan umat merupakan salah satu aspek penting yang harus diperjuangkan.

D. Pelestarian Lingkungan

Kalimantan yang terkenal dengan potensi alam dan potensi wisata alam kini keadaannya sangat memprihatinkan. Kerusakan lingkungan sudah menjadi pemandangan biasa dimana-mana. Eksploitasi tambang yang berlebihan, perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, kebakaran hutan serta sejumlah isu lingkungan lainnya dituding menjadi penyebab utama.

Kalimantan Barat sendiri tidak lepas dari akibat kerusakan lingkungan tersebut. Salah satunya adalah Penambangan Emas Tanpa Izin, hal ini juga menjadi permasalahan lingkungan yang masih problematis di Kalimantan Barat. Berdasarkan data pemetaan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, tiga kabupaten/kota yang bebas dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara.

Sementara 11 kabupaten/kota lainnya tercatat memiliki beberapa lokasi PETI, antara lain: Kabupaten Sambas (Kecamatan Subah, Selakau dan Tebas), Kota Singkawang (Kecamatan Singkawang Selatan dan Singkawang Timur), Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Lumar, Menterado, Sanggau Ledo, Samalantan, Sungai Duri, Capkala, Sui Betung, Bengkayang dan Teriak), Kabupaten Landak (Kecamatan Kuala Behe, Serimbu, Mandor dan Meranti), Kabupaten Melawi (Kecamatan Belimbing, Ella dan Menukung), Kabupaten Ketapang (Kecamatan Sandai, Sungai Laur, Simpang Hulu, Tayap, Matan Hilir Selatan, Tumbang Titi, Kendawangan dan Manis Mata), Kabupaten Sintang (Kecamatan Sepauk, Dedai, Ketungau Hulu, Binjai Hulu, Tebelian dan Ketungau Tengah), Kabupaten Sekadau (Kecamatan Sekadau Hilir, Belitang Hilir dan Nanga Mahap), Kabupaten Sanggau (Kecamatan Bonti, Sekayam, Kapuas dan Tayan Hilir), Kabupaten Kapuas Hulu (Kecamatan Pengkadan, Boyan Tanjung, Silat Hilir dan Putusibau Selatan), Kabupaten Mempawah (Kecamatan Toho dan Sadaniang)(Sumber: POLDA KALBAR dari Tribun Pontianak, 17 Mei 2018).

Selain PETI, permasalahan lingkungan yang hampir terjadi setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan lahan, yang berdampak pada adanya kabut asap. Pada Agustus 2018 misalnya, terdapat 1075 titik *hotspot* menurut data BMKG.

Gambar 2 Peta *Hotspot* Kalbar



Faktanya, krisis lingkungan yang terjadi di Kalimantan Barat adalah puncak gunung es dari krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia. Hal ini tentu menjadi masalah, mengingat pentingnya lingkungan atau alam karena menentukan keberlangsungan dan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi.

Pada dasarnya alam dan seluruh isinya diciptakan untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup manusia. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkannya secara terus-menerus dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai pula dengan sifat manusia yang kurang peduli menyebabkan lingkungan ini menjadi rusak.

Kerusakan lingkungan ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam kehidupan diantaranya terjadinya polusi, baik polusi udara, air, tanah maupun suara, hingga banjir dan tanah longsor yang bisa datang kapan saja. Banyaknya permasalahan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya disebabkan oleh alam namun juga disebabkan oleh ulah manusia. Bahkan kerusakan alam akibat perbuatan manusia berdampak lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam.

Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan sudah banyak dilakukan beberapa dekade terakhir ini. Namun, upaya ini tentunya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Faktanya tidak cukup hanya

mengandalkan tumbuhnya kesadaran pada masyarakat dengan sendirinya. Dibutuhkan suatu tindakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli pada lingkungan disekitarnya. Pada aras inilah, Perguruan Tinggi, termasuk IAIN Pontianak dapat ikut ambil bagian.

E. Minimalisasi Radikalisme dan Terorisme

Persoalan utama yang tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah berkembangnya radikalisme agama dan terorisme. Padahal tidak ada satu agamapun, termasuk Islam membenarkan aksi radikalisme bahkan terorisme. radikalisme yang menempuh kekerasan untuk mencapai tujuan itu sangat bertentangan dengan ajaran Agama Islam yang mengajarkan tentang kedamaian mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa telah ada sebagian perguruan tinggi yang terpapar radikalisme. Pola penyebaran paham radikalisme yang berkembang di lingkungan lembaga pendidikan saat ini sudah berubah, dari yang terselubung menjadi massif di kampus negeri maupun swasta. Hal ini menjadi problematis manakala, kita mafhumi, pendidikan tinggi merupakan tempat mencetak generasi-generasi intelektual yang berpikiran sehat. Tidak terkecuali pendidikan tinggi yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pada konteks ini, peran perguruan tinggi keagamaan Islam sangat diperlukan dalam mengembangkan model pendidikan yang santun dan toleran sehingga melahirkan alumni-alumni yang santun dan toleran serta anti radikalisme dan terorisme. Karenanya, IAIN Pontianak sebagai bagian dari perguruan tinggi keagamaan Islam, dapat menjadi garda terdepan dalam upaya meminimalisir radikalisme dan terorisme. Apalagi, mengingat Kalimantan Barat salah satu di antara daerah di Indonesia yang rentan konflik.

F. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Pelaksanaan keadilan dan kesetaraan gender sudah menjadi isu universal dan menjadi perhatian pemerintah sehingga diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, program gender juga menjadi

perhatian utama bagi Perguruan Tinggi untuk menuangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan strategis dan perencanaan operasional.

Kementerian Agama sebagai bagian dari pemerintah melalui Ditjen Pendidikan Islam merespon dengan memperkuat program responsif gender di PTKIN. Penegakan terhadap keadilan dan kesetaraan gender dengan memprogramkan kluster penelitian mengarah kepada riset berspektif gender.

Maraknya perkembangan keadilan dan kesetaraan gender juga menjadi perhatian khusus baik pemerintah dan masyarakat di Kalimantan Barat. Hal ini tampak pada banyaknya organisasi-organisasi di Kalimantan Barat yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender di Kalimantan Barat. Organisasi yang dimaksud, diantaranya Aliansi Perempuan dan Keadilan Gender (Alpckaje) Kalbar, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Borneo, Pemberdayaan Kepala Keluarga (Pekka) Kalimantan Barat, Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, dan lain-lain.

Berdasarkan data-data di atas, IAIN Pontianak sudah seyogyanya merespon program keadilan dan kesejahteraan gender sebagai bagian dari pemerintah. Oleh karena itu, IAIN Pontianak semestinya melakukan beberapa hal berikut, *pertama* melakukan kajian-kajian perspektif gender pada kajian-kajian konsep seperti diskusi, seminar, dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya serta melakukan riset-riset keislaman mengenai gender termasuk mengalokasikan mata kuliah gender dalam berbagai program studi. *Kedua*, mendirikan pelaksana utama kajian gender dalam kelembagaan seperti Pusat Kajian Gender (PKG) atau Pusat Studi Gender (PSG).

G. Pemberdayaan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

Dewasa ini, pemerintah Indonesia memfokuskan diri untuk pemerataan pembangunan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini disebabkan oleh bahwa eksistensi daerah 3T tidak lagi dipandang sebagai hanya sekedar 'perbatasan' atau 'bagian' dari Indonesia. Adanya kesenjangan tersebut, pemerintah Indonesia memprogramkan pembangunan secara khusus dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) terutama pada bidang pembangunan infrastruktur, dan pelayanan-pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai daerah 3T pada beberapa wilayahnya. Beberapa wilayah Kalimantan Barat yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yang berdasarkan kriteria; a) perekonomian masyarakat; b) sumber daya manusia; c) sarana dan prasarana ; d) kemampuan keuangan daerah; e) aksesibilitas; dan f) karakteristik daerah. Wilayah-wilayah yang dimaksud adalah kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, dan Kayong Utara sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden no 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Selain sebagai daerah tertinggal, beberapa daerah di Kalimantan Barat dinyatakan sebagai daerah perbatasan yaitu Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Sanggau.

Sebagian daerah ini berhadapan langsung dengan Malaysia bagian timur atau Serawak. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan pemerintah, perguruan tinggi harus melakukan pembangunan secara khusus pada daerah-daerah tersebut. Pembangunan daerah 3T oleh perguruan tinggi dengan mengadakan berbagai program khusus, seperti KKN perbatasan, pengiriman sarjana baru ke perbatasan, beasiswa, mengembangkan teknologi untuk daerah perbatasan, mengadakan kerjasama baik lokal, nasional, maupun internasional untuk pembangunan perbatasan.

H. Pelestarian Kearifan Lokal

Penduduk Kalimantan Barat memiliki kesadaran bahwa bahwa provinsi ini merupakan daerah yang *multicultural*, di mana terdapat berbagai macam suku dengan sejumlah kearifan lokal yang masih mereka tradisikan. Tentu saja, keadaan multicultural ini bisa jadi produktif jika dimanfaatkan secara positif dalam konteks pengkayaan khazanah budaya, tetapi akan menjadi kontraproduktif manakala dijadikan sebagai picu konflik.

Heterogenitas penduduk yang berdomisili di Kalimantan Barat merupakan miniatur Indonesia. Hampir semua suku yang ada di Indonesia terdapat di Kalbar. Baik yang datang sekedar mengadu nasib, tuntutan profesi sampai pada yang memilih Pontianak sebagai tempat menetap pada masa-masa pensiun hingga beranak cucu. Heterogenitas ini menyerupai *Melting Pot*, satu istilah yang biasa dipergunakan untuk menganalogikan masyarakat kosmopolit. Analogi ini mengibaratkan bahwa keragaman latar belakang etnis, agama, dan ras tersebut ditanak dalam sebuah panci

besar. Panci tersebut meramu beragam perbedaan menjadi cita rasa harmoni.

Di sinilah IAIN Pontianak, semestinya ikut andil dalam merawat kemajemukan atau keadaan multikultural itu, baik melalui warna pendidikan tinggi yang dikembangkan maupun budaya kampus. Sehingga, sebagaimana dalam visi IAIN Pontianak, ada kontribusi nyata IAIN Pontianak bagi masyarakat Kalimantan Barat pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

I. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerjasama

Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama perguruan tinggi amat diperlukan. Perguruan tinggi tidak bisa berjalan sendiri, yang berarti sebuah perguruan tinggi perlu membangun jaringan kerjasama yang baik dan efektif, baik antar perguruan tinggi, pemerintah, lembaga-lembaga lain, baik lokal maupun nasional. Hal ini penting, terutama untuk menjamin eksistensi perguruan tinggi, sehingga mampu berperan aktif, inovatif, dan inspiratif dan terpenting dapat menghasilkan alumni yang berdaya saing unggul dan punya andil dalam pembangunan masyarakat.

Kerjasama perguruan tinggi tidak hanya diperlukan sebagai branding, sehingga memancing minat calon mahasiswa, tetapi juga penting dalam meningkatkan akreditasi perguruan tinggi. Sangat dimafhumi, akreditasi yang baik dari sebuah perguruan tinggi merupakan pertimbangan calon mahasiswa melirik sebuah perguruan tinggi. Kenyataannya pula, akreditasi bukan hanya menarik minat calon mahasiswa akan tetapi juga menarik beberapa instansi lain untuk bekerjasama.

Kerjasama perguruan tinggi, perlu juga dilakukan dalam meningkatkan kualitas sistem informasi. Di zaman globalisasi sebagaimana saat ini, kemajuan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan secara positif bagi perkembangan kemajuan pendidikan tinggi, dan ini sangat bermanfaat untuk digunakan alat branding kampus untuk menarik mahasiswa baru dengan pelayanan yang serba canggih. Memang sistem informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan seperti, pelayanan dalam hal PMB, keakademikan, SDM serta seleksi pegawai, training dan pelatihan, serta sistem penggajian menjadi lebih canggih.

Dengan mengembangkan sistem informasi yang moderen, pengelolaan sebuah perguruan tinggi bisa berlangsung efektif, seperti: laporan-laporan yang tertata rapi sehingga memudahkan para pegawai, dan memperoleh

data yang detail dan valid untuk data evaluasi, serta dapat dibuat data pengambilan keputusan oleh pimpinan untuk kemajuan kampus tentunya.

Kerjasama perguruan tinggi baik di level lokal, nasional, bahkan internasional perlu dilakukan dalam hal kegiatan promosi. Kegiatan promosi merupakan komponen prioritas dari kegiatan branding dan pemasaran. Dengan adanya promosi maka konsumen (calon mahasiswa) akan mengetahui bahwa kampus mempunyai banyak program yang bagus untuk para calon mahasiswa baru. Kegiatan promosi banyak yang mengatakan identik dengan dana yang dimiliki oleh instansi. Semakin besar dana yang dimiliki oleh suatu instansi pendidikan maka umumnya akan menghasilkan tingkatan promosi yang juga sangat gencar untuk dapat dilakukan. Namun dana bukan diatas segala-galanya. Dana yang terbatas dapat diatasi dengan inovasi yang lebih pintar dan tepat, salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu menonjolkan prestasi kampus atau lain sebagainya. Di sinilah pentingnya kerjasama. Apalagi kegiatan promosi, erat kaitannya dengan penyebaran informasi untuk disampaikan ke calon mahasiswa baru. Dalam penyampaian strategi informasi ini ada beberapa cara yaitu seperti membuat brosur kampus, serta memanfaatkan iklan di sosial media, termasuk sebaran atau kantung promosi di daerah-daerah.

Kerjasama perguruan tinggi, juga perlu dilakukan dalam peningkatan kuantitas beasiswa. Kerjasama dalam hal ini ini sangat memberikan dampak positif bagi kampus, terutama mahasiswa dan atau alumni. Alumni juga perlu diperhatikan serapannya di dunia kerja, karena alumni akan menjadi tolak ukur bagi para calon mahasiswa baru dan persepsi masyarakat tentang kampus. Tidak hanya para alumnus yang berprestasi yang akan dijadikan acuan perbandingan oleh sebagian besar calon mahasiswa, tetapi juga kuantitas alumni yang terserap di pasar kerja. Oleh karena itu, perlu adanya *career centre*. *Career Centre* ini menjadi urgen dan sangat diperlukan bagi para alumni terutama dalam menjadi guide tentang lowongan kerja, serta menjadi pusat informasi tentang perusahaan yang telah bekerjasama dengan kampus mereka. *Career centre* sangat penting terutama dalam memantau para lulusan sebagai salah satu point penilaian dalam akreditasi, yang biasanya hanya menggunakan aplikasi *Tracer Study*.

Publikasi universitas juga penting diperhatikan. Dengan publikasi, reputasi dari sebuah perguruan tinggi akan terciptakan. Salah satu

caranya, bisa dengan membangun kerjasama dalam pengelolaan jurnal atau event-event ilmiah seperti konferensi dan seminar.

IV. FALSAFAH, NILAI DASAR, VISI DAN MISI

A. Falsafah

Falsafah yang dianut civitas ademika IAIN Pontianak adalah Falsafah Pancasila. Hal ini berarti bahwa setiap pemikiran, bahasa, dan gerak langkah civitas akademika harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai tafsir objektifnya, serta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang masih berlaku. Dalam kaitannya dengan Empat Pilar, maka selain Pancasila, dan UUD 1945, setiap pemikiran, bahasa, dan gerak langkah civitas akademika IAIN Pontianak haruslah berlandaskan pada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dan menjaga keutuhan “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Sehubungan dengan hal itu, maka civitas akademika IAIN Pontianak, dalam mewujudkan visi melalui misinya sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), perlu memiliki keyakinan-keyakinan dasar (*core beliefs*) bahwa:

1. Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis-formal, sosial, moral, dan terutama dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.
2. Agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat haruslah bermutu yang dapat dicapai melalui proses peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan (*continuously improvement*) melalui *local, national, regional, and global mindset* dimulai dari pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sampai dengan pencapaian *world class management system*.
3. Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermutu dapat diwujudkan dengan adanya niat yang ikhlas, kemauan yang kuat, tekad yang bulat, dan kompetensi yang tepat.

B. Nilai Dasar

Berdasarkan keyakinan filosofis, maka untuk mewujudkan visi melalui misi IAIN Pontianak, haruslah ditanamkan nilai-nilai dasar (*core values*) sebagai berikut:

1. Kebenaran (*siddiq/truth*), yang mencakup kebenaran secara yuridis-formal, kebenaran sosial, kebenaran moral, dan kebenaran secara profesional yang kesemuanya mengacu pada kebenaran ilahiah, yang dominan pada aspek “rasa-intrapersonal” dan “kecerdasan spiritual” serta terwujud dalam “integritas” kepribadian (Olah Hati → Kerja Ikhlas).
2. Bijak (*fathanah/wisdom*), yang mencakup rasional, objektif, antisipatif/visioner, open-mind, kritis, kreatif dan inovatif, yang dominan pada aspek “logika-intrapersonal” dan “kecerdasan intelektual” serta bermuara pada “kredibilitas” (Olah Pikir → Kerja Cerdas).
3. Komunikatif (*tabligh/communicate*), baik lisan (didukung mimik dan gesture) maupun tulisan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi, menjadi teladanpeduli, inklusif, asertif, empatik, transparan, dan kooperatif, yang dominan pada aspek “rasa-interpersonal” dan “kecerdasan emosional” serta bermuara pada “akseptabilitas” (Olah Rasa/Karsa → Kerja Tuntas).
4. Dipercaya (*amanah/trustworthiness*), yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan pendukung lainnya secara “profesional” yang terwujud dalam komitmen, etos kerja yang tinggi, kedisiplinan, kerja keras, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab, yang dominan pada aspek “logika-interpersonal” dan “kecerdasan sosial” serta bermuara pada “akuntabilitas” (Olah Raga → Kerja Keras).

C. Visi dan Misi Indonesia Masa Depan

Visi Indonesia masa depan adalah sebuah impian besar tentang Indonesia yang “Unggul, maju bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan telah cukup dewasa untuk mengatasi isu-isu persoalan klasik bangsa, seperti korupsi, isu disintegrasi, dan kemiskinan”.

Misi Indonesia masa depan adalah:

1. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
2. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung

jawab, dan Wawasan Kebhinekaan berketrampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

3. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
4. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang proaktif, mandiri, maju, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.
7. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketenteraman masyarakat.
8. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.
9. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
10. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

D. Visi dan Misi Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional mempunyai visi "Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

Misi Pendidikan Nasional adalah:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

E. Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia

Visi Kementerian Agama Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemaafa dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

F. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Visi Ditjen Pendis adalah “Terwujudnya Pendidikan Islam yang Unggul, Moderat, dan Menjadi Rujukan Dunia dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan Teknologi”.

Misi Ditjen Pendis adalah:

1. Meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan Islam.
3. Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam.
4. Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik.

G. Visi dan Misi IAIN Pontianak 2038

Visi IAIN Pontianak adalah, “Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo”.

Misi IAIN Pontianak adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang ulung dalam dalam kajian keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo.
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

V. FONDASI PENGEMBANGAN

A. Kebijakan Dasar IAIN Pontianak

Kebijakan yang digunakan dalam menjalankan fungsi, tugas, serta tanggung jawabnya menjalankan misi dan mewujudkan visi, maka IAIN Pontianak telah mempunyai modal awal untuk melangkah, salah satunya Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri. Dengan peraturan tersebut, diharapkan IAIN Pontianak dapat menjalankan tata kelola secara efisien, efektif, dan akuntabel.

B. Tanggung Jawab IAIN Pontianak Menjalankan Misi Mewujudkan Visi

Visi dan Misi IAIN Pontianak dirumuskan atas dasar komitmen kuat dari seluruh civitas akademika. Komitmen tersebut adalah: (1) komitmen menyelenggarakan pendidikan yang ulung; (2) mengembangkan kajian budaya lokal; (3) pengabdian pada masyarakat; (3) membentuk insan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Komitmen di atas diharapkan dapat bermuara pada terwujudnya IAIN Pontianak yang mampu berprestasi pada taraf internasional, dan menghantarkan IAIN Pontianak ke dalam jajaran *World Class University* serta menjadi lembaga pendidikan tinggi yang ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo.

Selain itu, faktor pendukung yang sangat kuat adalah komitmen seluruh pendiri dan tim pengembangan untuk bersama-sama berjuang dan berkorban dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk membangun, mengembangkan serta meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Tanggung jawab utama IAIN Pontianak adalah terselenggaranya layanan yang lebih cepat, efisien dan efektif bagi seluruh civitas akademik.

C. Harapan dan Sifat-sifat Dasar

Institut Agama Islam Negeri merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dengan jenjang pendidikan Strata 1 dan Strata 2. Untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Pontianak maka diperlukan dukungan dari segala lini yang ada di lingkungan tersebut, yaitu dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung penuh usaha pelaksanaan visi dan pencapaian misi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan layanan prima.

Perkembangan IAIN saat ini, tidak boleh melupakan cita-cita awal berdirinya sebagai tonggak perjuangan pendidikan umat Islam. Eksistensi dan kiprah perguruan tinggi Islam, selain harus berada di garis depan pendidikan nasional, sekaligus juga harus berdiri di garis depan dalam menjawab tantangan masa depan umat Islam. IAIN harus mempertahankan dan mengembangkan paradigma Islam sebagai basis dari keseluruhan kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Prinsip keagamaan dalam

konstitusi yang dipahami dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten, tidak memberikan celah atau ruang gerak yang mengarah kepada terjadinya sekularisasi pendidikan, sekularisasi kebudayaan, dan iptek.

Bermanfaat merupakan salah satu sifat dasar IAIN Pontianak sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang dibarengi dengan sifat ulung. Keulungan ditunjukkan dengan cirri-ciri: cerdas, disiplin, proaktif, terbuka, kreatif, mandiri, efektif, efisien, dan integratif. Dengan dimilikinya sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut, maka kehadiran IAIN Pontianak akan mendatangkan kemaslahatan bagi alam semesta; yaitu memberikan manfaat dan menjauhkan kemudharatan.

Memperhatikan sifat-sifat dasar tersebut, IAIN Pontianak memiliki komitmen untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah serta berakhlakul karimah. Dengan kriteria ini diharapkan civitas akademika IAIN Pontianak mampu melaksanakan fungsinya sebagai *khalifatullah fil-'ardl* dan mampu bersaing dalam kehidupan yang mensyaratkan perlunya modal spiritual, intelektual, emosional, dan fisik yang prima dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta dinamika masyarakat yang terus berkembang dan berubah.

Untuk mewujudkan semua harapan di atas, maka IAIN Pontianak memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan budaya Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

D. Infrastruktur IAIN Pontianak

Dalam melaksanakan semua kegiatan IAIN Pontianak didukung oleh Infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang digunakan. Sampai saat ini IAIN Pontianak memiliki aset kampus seluas 41.595M² yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Bidang, yaitu bangunan gedung.
2. Kelompok, yakni gedung tempat kerja.
3. Sub kelompok, yaitu gedung tempat pendidikan, ibadah, kantor, laboratorium, taman, pos jaga, tempat olah raga.
4. Sub-sub kelompok, yaitu gedung tempat pendidikan, ibadah, kantor, laboratorium, taman, pos jaga, tempat olah raga permanen dan tempat olah raga semi permanen, tempat olah raga tertutup permanen.

Dari empat bagian di atas dapat dirincikan dalam beberapa infrastruktur seperti; gedung perkuliahan, gedung perkantoran, laboratorium, perpustakaan, gedung olahraga, pos satpam, taman, masjid, dan aula pertemuan. Sarana prasarana gedung perkuliahan menjadi etalase terdepan yang dilihat dibanding aspek-aspek lainnya. Dengan infrastruktur yang terus ditingkatkan tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak.

E. Pengembangan IAIN Pontianak

IAIN Pontianak sebagai institusi pendidikan sekaligus bagian tak terpisahkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama. Ditjen Pendis dalam pengembangan tidak terlepas dari pilar-pilar strategis dari landasan filosofis pendidikan nasional yang mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sisdiknas dan visi, misi serta tujuan Kemenristekdikti.

Adapun pilar-pilar strategis dari landasan filosofis pendidikan nasional adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia; (2) Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi; (3) Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogi; (4) Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan; (5) Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik; (7) Pembiayaan Pendidikan sesuai Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan; (8) Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata; (9) Pelaksanaan Wajib Belajar; (10) Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan; (11) Pemberdayaan Peran Masyarakat; (12) Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat; (13) Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional.

F. Base Line Menuju Visi IAIN 2038

IAIN Pontianak mempunyai beberapa modal dasar mendukung perwujudan visi tahun 2038 yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul

dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo.

Modal dasar yang bisa mewujudkan visi IAIN Pontianak tersebut antara lain; IAIN Pontianak merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) di Kalimantan Barat, variasi fakultas dan program studi sangat beragam, Secara kuantitatif, tenaga dosen IAIN Pontianak telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari aspek kualifikasi dan jenjang pendidikan, menyediakan sumber belajar bagi mahasiswa secara memadai dan telah memperoleh akreditasi dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional adanya pengembangan SDM berstandar nasional dan internasional, Kualifikasi keilmuan yang dimiliki oleh dosen IAIN Pontianak mencukupi untuk dapat melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, sistem informasi akademik berbasis online system, Banyaknya beasiswa yang disediakan baik dari IAIN Pontianak maupun pihak luar, seperti beasiswa BI, Telkom, Hafidz Quran, RS Joempa, Telah ada sistem tata kelola birokrasi dan administrasi di IAIN Pontianak, Telah ada sistem tata kelola keuangan di IAIN Pontianak, Telah ada sistem tata kelola aset di IAIN Pontianak, Tersedia SDM yang mengelola birokrasi dan administrasi, keuangan, pendataan aset, dan kerumahtanggaan di IAIN Pontianak dengan kapabilitas, integritas dan komitmen tinggi dalam kerja, jaringan kerjasama. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah semangat menuju perubahan (*agent of change*) dari semua komponen dan mewujudkan universitas yang unggul.

VI. STRATEGI DASAR

Berdasarkan isu-isu universal, nasional dan lokal, falsafah, nilai-nilai dasar, visi dan misi, serta fondasi pengembangan yang ada saat ini, maka disusun strategi dasar pengembangan IAIN Pontianak 2018-2038 sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dengan memegang prinsip *good governance* untuk mencapai organisasi yang lebih sehat;
 - b. Perubahan status IAIN Pontianak menjadi UIN.
 - c. Perubahan IAIN Pontianak menjadi Satker BLU.
 - d. Peningkatan kapasitas organisasi dan kelembagaan yang sinergis dalam mewujudkan Tri dharma Perguruan Tinggi.

2. Pengembangan keunggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai konservasi untuk mengembangkan peradaban bangsa yang berdaya saing global;
 - a. Peningkatan kualitas pelaksanaan Tri dharma untuk mewujudkan keunggulan Perguruan Tinggi pada taraf nasional, regional dan Internasional.
 - b. Pengembangan kurikulum berorientasi KKNI, proses pembelajaran, dan budaya akademik (*curriculum, learning process, and academic culture development*) serta kepribadian islami yang moderat, anti radikalisme dan terorisme.
 - c. Kerjasama dalam bidang keilmuan di tingkat Nasional dan regional.
 - d. Pengembangan kemahasiswaan dan alumni berorientasi daya saing (*student and graduate profile development*).
 - e. Penyelenggaraan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan riset yang inovatif dan berakar pada nilai keislaman dan kearifan lokal/budaya Borneo.
 - f. Pengembangan penelitian, penerbitan dan pengabdian masyarakat (*research, publishing, and community development*) berbasis internet.
 - g. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada daerah 3T, penanggulangan masalah-masalah lingkungan baik fisik maupun sosial.
 - h. Peningkatan kepercayaan (*social reliability*) dan jaringan kerja untuk mendukung pengembangan Perguruan Tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
2. Peningkatan layanan prima yang amanah kepada semua pemangku kepentingan berlandaskan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, kualitas sekaligus relevansi, keadilan, kesetaraan, dan kepastian.
 - a. Penguatan kualitas sumber daya manusia serta daya dukung sarana dan prasarana secara berkelanjutan dalam menunjang aktivitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Peningkatan standard kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki komitmen, etika, integritas dan akuntabilitas.
 - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan IPM.
 - d. Pembangunan Kampus 2 IAIN Pontianak.
 - e. Peningkatan sarana penunjang informasi menuju kampus digital.

- f. Peningkatan kualitas jaringan internet guna menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan berkualitas.
 - g. Pengembangan tatakelola ketenagaan berbasis pada peningkatan kinerja dan penguatan budaya organisasi (*human resources development based on quality improvement and organization culture*).
 - h. Pengembangan kelembagaan dan tatakelola yang berorientasi pada daulat sistem (*system authority*) melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi (*institutional and management development based on information and technological system*).
 - i. Penyelenggaraan tatakelola yang akuntabel, transparan, bersih dan terpercaya.
3. Perluasan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika IAIN Pontianak khususnya peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mampu mengembangkan kinerjanya secara profesional.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Arah pengembangan IAIN Pontianak 2018-2038 disusun dengan memperhatikan strategi-strategi dasar yang telah dicantumkan sebelumnya. Arah pengembangan dimaksud dijabarkan dalam matriks skenario serta tahapan, arah, target utama dan indikator umum berikut ini.

B. Matriks Skenario

Agar lebih mudah memahami arah pengembangan, maka berikut ini ditampilkan matriks skenario pengembangan IAIN Pontianak 2018 – 2038.

Tabel 5
Skenario Pengembangan IAIN Pontianak

TAHAP	LEVEL TARGET				ARAH
	NASIONAL	REGIONAL	DUNIA		
	BAN-PT	AUN-QA	ISESCO	ISO	
PERTAMA (2018-2022)	Terakreditasi "B"	Inisiasi	-	-	<i>Good University Governance</i>
KEDUA (2022-2026)	Terakreditasi "A" (ULUNG)	Terakreditasi	Inisiasi	-	<i>University's Performance Improvement</i>
KETIGA (2026-2030)	Terakreditasi "A" (ULUNG)	ULUNG	Terakreditasi	Inisiasi	<i>Competitive Advantages University</i>
KEEMPAT (2030-2034)	Terakreditasi "A" (ULUNG)	ULUNG	ULUNG	Terakreditasi	<i>Global Recognition</i>
KELIMA (2034-2038)	Terakreditasi "A" (ULUNG)	ULUNG	ULUNG	ULUNG	<i>University</i>

CATATAN: Ulung = Unggul

C. Tahapan, Arah, Target Utama dan Indikator Umum

1. Tahap Pertama

- a. Arah: Terwujudnya IAIN Pontianak sebagai *Good University Governance*.
- b. Target Utama:
 - 1) Terbentuknya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak yang berfungsi secara efektif.
 - 2) Terbentuknya Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Pontianak yang berfungsi secara efektif.
 - 3) Tersusun dan terimplementasikannya Prosedur Operasional Baku (POB) IAIN Pontianak yang bersifat komprehensif.

- 4) Terwujudnya anggaran IAIN Pontianak yang basis kinerja dengan memperhatikan:
 - a) Penelitian dan penerbitan.
 - b) Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
 - c) Peningkatan jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - d) Realisasi anggaran.
 - e) Kesiapan untuk menjadi Satker BLU.
- 5) Terwujudnya kepemimpinan IAIN Pontianak dalam hal:
 - a) Publik/kemasyarakatan.
 - b) Organisasional.
- 6) Terwujudnya rasio dosen IAIN Pontianak yang memadai antara:
 - a) Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dengan dosen dalam jabatan Lektor dan Asisten Ahli.
 - b) Dosen berpendidikan Doktor dan Magister.
 - c) Dosen tetap dan tidak tetap.
 - d) Dosen dan mahasiswa.
- 7) Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) IAIN Pontianak yang:
 - a) Mencukupi dalam hal infrastruktur.
 - b) Mencukupi dalam hal suprastruktur.
 - c) Mencukupi dalam hal kepedulian civitas akademika terhadap Teknologi Informasi (TI).
- 8) Terwujudnya Sarana dan Prasarana berupa:
 - a) Pembangunan gedung *Tower C, D, E, dan F* di Kampus 1 IAIN Pontianak untuk meningkatkan daya tampung, agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses pendidikan tinggi dan meningkatkan IPM. Dengan demikian diharapkan mereka dapat berperan serta dalam menanggulangi kemiskinan.
 - b) Lahan Kampus 2 IAIN Pontianak.
 - c) Jaringan internet dengan menggunakan *fiber optic* untuk mendukung pengembangan IAIN Pontianak menjadi kampus digital.
 - d) Perpustakaan Digital.
- 9) Terwujudnya organisasi kemahasiswaan di IAIN Pontianak yang:
 - a) Dapat mewadahi pembinaan kepribadian, minat, dan bakat mahasiswa.

- b) Mampu mendukung peningkatan daya saing dan pencapaian prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang.
 - c) Mampu melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanganan isu-isu di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- 10) Terwujudnya perilaku organisasi di IAIN Pontianak yang:
- a) Dapat menumbuhkan lingkungan akademik yang kreatif dan inovatif, kondusif dan nyaman, serta berkeadilan/berkesetaraan gender.
 - b) Dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, bersih, sehat, dan indah.
 - c) Dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka melestarikan budaya lokal serta membangun daerah Terluar, Terpencil, dan Tertinggal (3T).
- 11) Terlaksananya internalisasi dan pengamalan nilai-nilai keislaman di IAIN Pontianak antara lain dalam bentuk:
- a) Perilaku yang moderat, anti radikalisme dan terorisme.
 - b) Implementasi integrasi keilmuan dalam kurikulum dan silabus.
 - c) Buku/modul yang berisi integrasi keislaman.

2. Tahap Kedua

- a. Arah: Terwujudnya IAIN Pontianak sebagai *University's Performance Improvement*.
- b. Target Utama:
 - 1) Pengembangan keilmuan:
 - a) Terbentuknya konsorsium keilmuan di IAIN Pontianak.
 - b) Terbentuknya Standard Kompetensi Lulusan (SKL) untuk masing-masing program studi di IAIN Pontianak.
 - 2) Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM):
 - a) Tingginya nilai-rata kinerja dosen IAIN Pontianak berdasarkan penilaian mahasiswa dan pimpinan.
 - b) Tingginya nilai rata-rata kinerja tenaga kependidikan IAIN Pontiana berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Laporan Kinerja Pegawai (LKP).

- 3) Kontribusi unit:
 - a) Terimplementasikannya Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap unit di IAIN Pontianak.
 - b) Terealisasikannya target capaian kinerja unit di IAIN Pontiana per tiga bulanan dengan nilai rata-rata capaian yang tinggi.
- 4) Waktu studi: Banyaknya mahasiswa IAIN Pontianak yang lulus dalam waktu ≤ 4 tahun.
- 5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): Banyaknya mahasiswa IAIN Pontianak yang lulus dengan IPK $\geq 3,50$.
- 6) Kelembagaan:
 - a) Pengajuan perubahan status IAIN Pontianak menjadi UIN Pontianak.
 - b) Kategori nilai Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT) IAIN Pontianak adalah Ulung/Unggul (A).
- 7) Akreditasi program studi: Kategori nilai Akreditasi Program Studi (APS) di IAIN Pontianak pada umumnya adalah Ulung/Unggul (A).
- 8) Lulusan IAIN Pontianak yang berdaya saing:
 - a) Memiliki sertifikat profesi dari dalam negeri.
 - b) Sebagian besar telah terserap di dunia kerja.
 - c) Rata-rata masa tunggu kerja ≤ 5 tahun.
- 9) Terwujudnya Sarana dan Prasarana berupa:
 - a) Persiapan perubahan fungsi gedung di Kampus 1 menjadi sentra bisnis IAIN Pontianak.
 - b) Persiapan pembangunan Kampus 2 IAIN Pontianak.
 - c) Laboratorium yang modern.

3. Tahap Ketiga

- a. Arah: Terwujudnya IAIN Pontianak sebagai *Competitive Advantages University*.
- b. Target Utama:
 - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IAIN Pontianak yang berkualitas:
 - a) Tersedianya cetak biru pengembangan LPPM.
 - b) PPM yang memiliki dampak luas terhadap dunia industri, organisasi, dan kemasyarakatan.
 - c) Memiliki capaian kinerja yang tinggi berdasarkan laporan IKU.
 - 2) Memiliki sejumlah jurnal yang terindeks internasional.

- 3) Memiliki sejumlah jurnal yang terakreditasi nasional.
 - 4) Meningkatnya jumlah publikasi internasional:
 - a) Jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
 - b) Jumlah dosen yang artikelnya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
 - 5) Meningkatnya jumlah mahasiswa asing.
 - 6) Terwujudnya keberlanjutan pendanaan yang mampu menopang pengembangan IAIN Pontianak yang berasal dari:
 - a) Dana bisnis dan kerjasama.
 - b) Dana masyarakat.
 - c) Dana pemerintah.
 - 7) Terwujudnya Sarana dan Prasarana berupa:
 - a) Perubahan fungsi gedung di Kampus 1 menjadi sentra bisnis IAIN Pontianak.
 - e) Pembangunan Kampus 2 IAIN Pontianak.
4. STahap Keempat dan Kelima
- a. Arah: Terwujudnya IAIN Pontianak sebagai *Global Recognition University*.
 - b. Target Utama:
 - 1) Terwujudnya kerjasama internasional yang luas dalam bentuk:
 - a) Ikutsertanya sejumlah dosen IAIN Pontianak dalam riset-riset berskala internasional.
 - b) Adanya sejumlah dosen IAIN Pontianak yang menjadi dosen tamu di perguruan-perguruan tinggi luar negeri.
 - 2) Terwujudnya peningkatan rasio dosen luar negeri di IAIN Pontianak.
 - 3) Adanya sejumlah dosen IAIN Pontianak yang memperoleh penghargaan internasional.
 - 4) Memiliki dampak sosial-ekonomi secara global:
 - a) IAIN Pontianak masuk dalam Top 5.000 perguruan tinggi dunia.
 - b) IAIN Pontianak menjadi salah satu destinasi dan rujukan dunia Islam.
 - 5) Terwujudnya Sarana dan Prasarana berupa:
 - a) Ruang kelas yang mendukung *e-learning*.
 - b) Kampus digital.

D. Pengendalian dan Penjaminan Mutu

Agar Visi IAIN Pontianak 2018 – 2038 dapat tercapai sesuai yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengendalian dan penjaminan mutu yang dilangsungkan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan di seluruh tahapan pengembangan. Pengendalian dan penjaminan mutu dimaksud pada dasarnya dilakukan melalui:

1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) yang melakukan pengendalian dan penjaminan mutu untuk bidang akademik yang mencakup pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengendalian dan penjaminan mutu untuk bidang non-akademik yang antara lain mencakup perencanaan, keuangan, kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana.

Temuan-temuan yang memenuhi kriteria *Problem*, *Location*, *Object*, dan *Reference* (PLOR) dan pengaduan yang memenuhi minimal dua alat bukti disampaikan:

1. kepada Komite Etik untuk temuan dan pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik oleh SDM guna dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
2. untuk dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam hal lainnya guna dibahas dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 03 September 2018

REKTOR,


Dr. SYARIF, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001